

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun: 2020

2	0	1	9
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 13

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan <input checked="" type="checkbox"/>	

Anggaran Covid Baru Terealisasi Rp33 Miliar



TABENGAN/ARIS MUNANDAR

JAWABAN - Bupati Katingan Sakariyas SE menyampaikan pidatonya atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Senin (16/11).

KASONGAN - Anggaran untuk penanganan pandemi Corona virus (Covid - 19) di Kabupaten Katingan baru Rp33 miliar lebih yang terealisasi dari Rp 138 miliar yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga (BTT).

Demikian dikatakan Bupati Katingan Sakariyas, menyampaikan jaw-

aban Pemkab Katingan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2021, di ruang paripurna DPRD Katingan, Senin.

Menurutnya, Rp33.089.453.807 atau 23,89 persen serapan anggaran dari anggaran sebesar Rp.

138.504.863.405,97 adalah kondisi sampai November 2020. Dengan demikian, masih tersisa anggaran Rp. 105.415.409.598,97.

Terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) yang sudah terbentuk menyusun Roadmap untuk tahun 2021 dengan penganggarannya serta untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Katingan menurutnya, sudah dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

Dalam rangka menangani masalah Covid-19, maka kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan Testing, Tracing, And Treatment (3 T) yang ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang rentan atau usia lanjut.

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mengatasi dampak dari Covid-19 adalah kebijakan pemerintah ke depan tetap beranjak kepada dua asumsi dasar.

Apabila pandemi Co-

vid-19 dapat di atasi di Kabupaten Katingan, maka pemerintah daerah akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat serta mempercepat pelaksanaan pembangunan yang sumber anggarannya dari APBD kepada sektor-sektor yang dapat segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja dengan tetap mempedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Sedangkan asumsi kedua, apabila pandemi Covid-19 terjadi peningkatan, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan aktifitas ekonomi/produksi masyarakat dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat, dan menjaga agar masyarakat tetap dapat beraktifitas, serta meningkatkan jaring pengaman sosial dengan kriteria yang ketat dan jelas. c-dar